

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

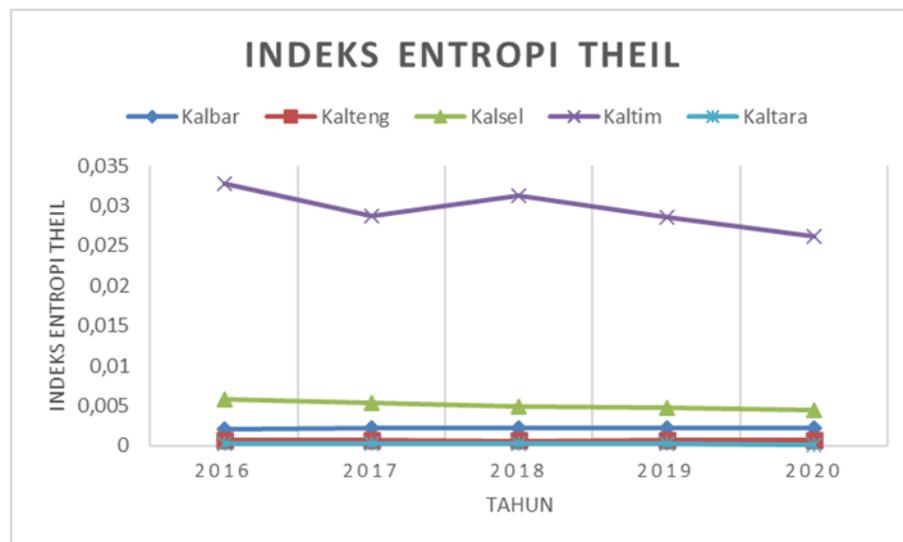
Pembangunan adalah suatu proses yang terus berlangsung tanpa henti untuk mewujudkan cita-cita negara dalam menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kesetaraan bagi masyarakatnya. Proses pembangunan berlangsung secara bertahap dan terencana, dengan fokus pada pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya dan melibatkan semua aspek kehidupan (Deviyanti, 2013). Pembangunan bersifat multidimensional dan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, melainkan juga mencakup perubahan dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan kelembagaan nasional, agar dampaknya bisa dirasakan dalam berbagai aspek (Wirawan & Nurpratiwi, 2015).

Pembangunan wilayah sering diidentifikasi sebagai upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga keberlanjutan lingkungan di suatu wilayah (Pane, 2013). Untuk mencapai tujuan ini, negara harus memusatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemampuan akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dan sosial, serta meningkatkan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok bagi masyarakat (Wirawan & Nurpratiwi, 2015). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki di setiap wilayah, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Perbedaan dalam kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, budaya sosial, dan kapasitas sumber daya manusia telah menyebabkan adanya ketimpangan yang masih terus berlanjut di Indonesia, di mana kesejahteraan masyarakat tidak selalu merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah ketimpangan ini, yang tidak hanya terjadi di tingkat individu atau rumah tangga, tetapi juga di tingkat wilayah (Sukwika, 2018).

Isu keadilan dalam pengembangan wilayah terus menjadi topik pembicaraan yang signifikan karena kaitannya dengan ketimpangan wilayah. Hingga saat ini, kesenjangan wilayah masih tampak antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia, serta antara Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa (Wilonoyudho, 2009). Pola kesenjangan wilayah di Indonesia masih bertahan, dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) berperan sebagai pusat gravitasi pembangunan, sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tetap menjadi wilayah pinggiran. Pulau Kalimantan adalah salah satu wilayah KTI terluas kedua setelah Papua, dan meskipun menjadi penghasil devisa terbesar bagi negara, pembangunan di sana masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, kontribusi Pulau Kalimantan terhadap perekonomian Indonesia hanya mencapai 8,52% rata-rata. Pembangunan di Kalimantan belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, yang tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah yang terus meningkat (BPS, 2019).

Menurut Hill (1993), beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan wilayah meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kualitas Kehidupan secara Fisik, dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Evaluasi mengenai keberhasilan pembangunan wilayah dapat dilakukan di berbagai tingkat, seperti nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu contoh evaluasi ini dapat diterapkan di tingkat provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengkaji kondisi perkembangan wilayah yang terdiri dari tujuh kabupaten dan tiga kota.



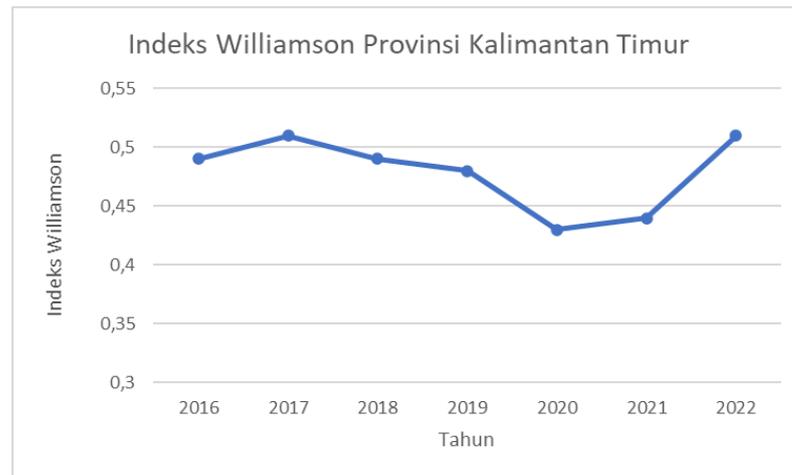
**Gambar 1. 1 Indeks Entropi Theil**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2020

Indeks Entropi Theil adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan antar daerah dan kesenjangan dalam suatu daerah (Muta'ali, 2015). Semakin tinggi nilai Indeks Entropi Theil, semakin besar ketimpangan yang ada, sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Entropi Theil, semakin kecil tingkat ketimpangan. Grafik yang diberikan menunjukkan nilai Indeks Entropi Theil dalam suatu wilayah, khususnya pada tingkat provinsi di Pulau Kalimantan. Dari Gambar

1.1, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat ketimpangan wilayah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,0295, Indeks Entropi Theil Provinsi Kalimantan Timur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat isu strategis kewilayahan yang mana terjadi ketimpangan yang ditandai dengan adanya kemajuan pembangunan terutama pada wilayah perkotaan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya yang merupakan wilayah lainnya yang masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, air bersih dan sanitasi, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan ifrastruktur. Hal tersebut juga diperkuat dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang menyatakan bahwa ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjadi isu strategis kewilayahan yang diidentifikasi dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Adapun ketimpangan tersebut dapat dilihat berdasarkan Indeks Wiliamson.



**Gambar 1. 2 Indeks Wiliamson Provinsi Kalimantan Timur**

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024

Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah, seperti antar wilayah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi, maupun antar provinsi dalam negara. Indeks ini pada dasarnya digunakan untuk melihat perbandingan PDRB per kapita suatu wilayah dengan jumlah penduduk dalam wilayah tersebut (Muta'ali, 2015). Berdasarkan data yang termuat dalam dokumen RPJM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan terjadi penurunan dari tahun 2016 ke 2020, tetapi mengalami kenaikan pada tahun berikutnya sebesar 0,51 yang tercatat masih cukup tinggi. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan dalam sumber daya antar wilayah, aksesibilitas, dan tingkat mobilitas barang dan jasa, yang semuanya berkontribusi pada tingkat ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat sehingga dapat menurunkan ketimpangan yang terjadi.

Pengembangan suatu wilayah akan berlangsung lebih cepat jika didukung oleh infrastruktur dan sistem jaringan yang baik di wilayah tersebut. Aksesibilitas memainkan peran kunci dalam mendorong perkembangan berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik (Ramadani, 2019). Oleh karena itu, pembangunan wilayah harus didukung oleh sistem transportasi yang efisien, karena sarana dan prasarana transportasi yang baik akan memberikan dukungan penting bagi perkembangan wilayah yang lebih baik. Sumaatmaja (1988) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana di suatu wilayah menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Sarana dan prasarana transportasi memainkan peran kunci dalam mendukung perkembangan fisik. Selain itu, jumlah jaringan jalan yang ada di suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat aksesibilitas dalam wilayah tersebut. Dengan demikian, aksesibilitas yang baik akan memfasilitasi interaksi antar wilayah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pemerataan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan tingkat aksesibilitas wilayah, yaitu semakin tinggi tingkat aksesibilitas, semakin cepat perkembangan wilayah tersebut (Muta'ali, 2015).

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 mengidentifikasi enam isu strategis yang menjadi prioritas pemerintah karena dampaknya yang signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat dalam lima tahun mendatang. Isu-isu ini dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pembangunan nasional, isu internasional, dan kesepakatan regional-global. Salah satu isu strategis yang diungkapkan dalam dokumen tersebut adalah meningkatkan

aksesibilitas dan memperkuat konektivitas infrastruktur wilayah. Hal ini dikarenakan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi masalah aksesibilitas dan konektivitas yang kurang memadai akibat rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar.

Sebagai respons terhadap isu ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi kondisi aksesibilitas dan konektivitas pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dan aksesibilitas wilayah pada tahun 2016 dan 2020. Penelitian ini akan mengidentifikasi variasi kondisi tingkat perkembangan wilayah dan aksesibilitas wilayah, menggambarkan jenis hubungan yang mungkin terjadi antara keduanya, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian semacam ini penting untuk memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas di wilayah tersebut, serta untuk mengembangkan strategi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkecil kesenjangan yang ada.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat kesenjangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dan adanya isu strategis terkait dengan peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah. Oleh karena hal tersebut, analisis

mengenai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat aksesibilitas penting untuk dilakukan karena merupakan faktor potensial untuk menentukan masa depan perkembangan suatu wilayah sehingga dapat diketahui rekomendasi strategi untuk pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana variasi tingkat aksesibilitas wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan 2020?
2. Bagaimana variasi tingkat perkembangan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan 2020?
3. Bagaimana tipologi antara tingkat aksesibilitas wilayah dan tingkat perkembangan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?
4. Bagaimana rekomendasi strategi pembangunan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Menganalisis variasi tingkat aksesibilitas wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan 2020.
- b. Menganalisis variasi tingkat perkembangan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan 2020.
- c. Menganalisis tipologi antara tingkat perkembangan wilayah dan tingkat aksesibilitas wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Menentukan rekomendasi strategi pembangunan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang pembangunan wilayah khususnya yang berkaitan dengan pengurangan kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sebuah gambaran terkait kondisi dan pergeseran tingkat perkembangan wilayah pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam selang waktu lima tahun serta gambaran informasi mengenai tingkat aksesibilitas di Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Memberikan masukan serta arahan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sebagai upaya pemerataan pembangunan berdasarkan tipologi dari tingkat perkembangan wilayah dan tingkat aksesibilitas di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1. Geografi**

Geografi adalah sebuah ilmu yang sangat kompleks dengan cakupan penelitian yang sangat luas. Bintarto (1977) mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik bumi, menganalisis fenomena alam dan manusia, serta memahami keragaman kehidupan. Sementara itu, para ahli geografi Indonesia dalam

Seminar dan Lokakarya di Semarang pada tahun 1988 menjelaskan bahwa geografi mempelajari persamaan dan perbedaan dalam fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang lingkungan dan wilayah dalam kerangka ruang. Dalam penelitian geografis, tiga pendekatan utama yang harus digunakan adalah pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan wilayah, sebagaimana dijelaskan oleh Hagget (1972). Ketiga pendekatan ini merupakan ciri khas geografi yang tidak dimiliki oleh ilmu lain. Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang memeriksa fenomena geografis dengan fokus pada keanekaragaman dan karakteristik ruang di permukaan bumi. Hal ini menekankan bahwa setiap wilayah memiliki ciri-ciri unik dan permasalahan yang berbeda-beda. Pendekatan lingkungan lebih menekankan pada hubungan antara manusia dan lingkungannya, di mana interaksi keduanya memiliki dampak sebab-akibat yang signifikan.

Sementara pendekatan wilayah merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan, karena setiap wilayah memiliki kondisi alam dan budaya yang berbeda, mendorong interaksi kompleks dengan wilayah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kompleks wilayah karena pada dasarnya, masing-masing wilayah memiliki perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan adanya variasi antar wilayah yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah dan tingkat aksesibilitas wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.5.2. Wilayah**

Ilmu wilayah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang memfokuskan kajiannya pada wilayah, terutama sebagai suatu sistem. Hal tersebut mencakup hubungan, interaksi, dan bagaimana wilayah tersebut berhubungan dengan wilayah lainnya dalam rangka pengembangan dan pelestarian keberlanjutan wilayah tersebut (Murtopo, 2009). Berdasarkan definisi ini, wilayah dapat dianggap sebagai unit geografis yang memiliki batas yang jelas, dan berbagai komponen di dalamnya berinteraksi secara fungsional (Rustiadi, 2011). Setiap wilayah berusaha untuk mencapai visi dan misi yang sama dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah. Pemahaman tentang wilayah ini lebih berfokus pada interaksi manusia dengan sumber daya lain yang ada dalam suatu batas wilayah geografis tertentu. Terdapat empat jenis batasan wilayah yang dapat diidentifikasi, sesuai dengan penjelasan oleh Fatimah (2020):

- 1) Wilayah Homogen, merujuk pada wilayah yang dilihat dari satu aspek tertentu yang memiliki karakteristik yang serupa. Karakteristik homogenitas dapat berupa aspek ekonomi (seperti wilayah dengan struktur produksi dan konsumsi yang serupa, tingkat pendapatan yang rendah, dll.), aspek geografis (seperti wilayah dengan topografi yang serupa, iklim yang sama), aspek sosial (seperti agama, suku, budaya), dan sebagainya.
- 2) Wilayah Nodal, merujuk pada wilayah yang memiliki hubungan fungsional antara pusat (inti) dan wilayah di sekitarnya (hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat terlihat dalam aliran penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, serta komunikasi dan transportasi. Wilayah nodal bisa

dianggap sebagai "sel atom" di mana ada inti dan plasma yang saling melengkapi, seperti yang dijelaskan oleh Hoover (1977).

- 3) Wilayah Administratif, merujuk pada wilayah yang memiliki batas yang ditentukan berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan. Wilayah administratif menjadi dasar praktis untuk pengembangan wilayah, tetapi seringkali pembangunan tidak terbatas pada satu batas administratif, dan kerjasama lintas wilayah administratif diperlukan.
- 4) Wilayah Perencanaan, merujuk pada wilayah yang didefinisikan berdasarkan sifat-sifat ketergantungan tertentu yang memerlukan perencanaan yang terintegrasi. Wilayah perencanaan tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga aspek ekologisnya. Sebagai contoh, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus direncanakan secara terpadu dari hulu hingga hilir karena keduanya saling mempengaruhi.

Tipe wilayah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tipe wilayah administratif. Hal tersebut karena unit analisis yang digunakan di dalam penelitian adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari tujuh kabupaten dan tiga kota. Penggunaan tipe wilayah administratif memudahkan dalam menentukan arahan perkembangan wilayahnya karena menurut Muta'ali (2015), penggunaan unit analisis administrasi dipertimbangkan karena keberadaan dan ketersediaan data

maupun nilai dan manfaat dari kebijakan pembangunan yang selalu didasarkan pada aspek batas administrasi.

### **1.5.3. Perkembangan Wilayah**

Perkembangan wilayah merupakan sebuah proses berkembangnya suatu wilayah baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, dan budayanya untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik (Kuncoro, 2002). Analisis perkembangan wilayah pada dasarnya merupakan bentuk dari pewilayahan yang dilakukan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk keberlangsungan suatu kegiatan pembangunan dan perkembangan wilayah (Muta'ali, 2015). Menurut Catanese & Synder (1989), perkembangan wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik dapat berupa faktor geografis seperti topografi dan faktor lokasi yang terkait dengan kondisi infrastruktur sebagai penghubung antar wilayah. Sementara itu, faktor non fisik dapat berupa faktor perkembangan penduduk seperti kelahiran dan kepadatan penduduk, serta faktor aktivitas sebuah wilayah yang berupa kondisi perekonomian yang dilihat dari komoditas unggulan dan bentuk tipologi ekonomi.

### **1.5.4. Aksesibilitas Wilayah**

Menurut Odi, dkk., 2004 dalam Rahayu (2020) aksesibilitas adalah sebuah pengukuran yang mencakup kemudahan dalam hal waktu, biaya, dan upaya yang diperlukan untuk melakukan perpindahan antar tempat dalam suatu sistem. Aksesibilitas juga dapat dijelaskan sebagai konsep yang menggabungkan pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya (Almuizat, 2022). Di sisi lain,

Black (1981) mendefinisikan aksesibilitas sebagai ukuran kenyamanan atau kemudahan dalam interaksi antara lokasi tata guna lahan satu dengan yang lainnya, serta sebagai indikator seberapa mudahnya lokasi tersebut dijangkau melalui sistem jaringan.

Aksesibilitas dapat dijelaskan juga sebagai ketersediaan jaringan dan infrastruktur penghubung yang menghubungkan berbagai wilayah. Menurut Gunn (1994), konsep aksesibilitas terbagi menjadi dua komponen, yaitu akses dan *linkage*. Akses merujuk pada pintu masuk atau jalur yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya, terutama dalam konteks infrastruktur transportasi. Sementara itu, *linkage* mengacu pada koneksi antarwilayah di dalam suatu daerah. Kemudahan aksesibilitas dapat diukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu yang diperlukan, biaya yang harus dikeluarkan, dan usaha yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu, menurut Muta'ali (2015), beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas meliputi sistem jaringan transportasi, ketersediaan jalan, sarana transportasi yang tersedia, kualitas dan jumlah jalan yang ada, serta tata guna lahan.

Aksesibilitas suatu wilayah secara sederhana dapat diukur dengan jarak. Apabila suatu tempat berdekatan dengan tempat yang lainnya, maka dapat dikatakan bahwa aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Tetapi, faktor jarak tidak dapat diandalkan karena pada faktanya antara dua wilayah memiliki posisi berdekatan, tetapi kedua wilayah tersebut tidak terdapat prasarana jaringan transportasi yang menghubungkan. Dengan begitu,

jarak bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya aksesibilitas di suatu wilayah. Hal tersebut karena aksesibilitas yang tinggi terjadi apabila antar wilayah memiliki prasarana dan sarana transportasi memadai meskipun jarak kedua wilayah tersebut jauh. Sebaliknya, meskipun jarak kedua wilayah dekat, tetapi tidak memiliki prasarana dan sarana transportasi yang memadai, maka aksesibilitas rendah (Miro, 2004).

Sistem transportasi merupakan salah satu kunci perkembangan pembangunan wilayah. Transportasi ini dapat menghilangkan isolasi dan memberi *stimulant* ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri, ataupun sektor lainnya sehingga terjadi pemerataan di semua daerah. Menurut Black (1981), aksesibilitas dapat digambarkan dengan jarak, waktu tempuh, serta ketersediaan prasarana dan sarana transportasi.

#### **1.5.5. Interaksi wilayah**

Interaksi wilayah adalah fenomena timbal balik di antara dua wilayah atau lebih yang memicu aktivitas, dan semakin besar interaksi antara wilayah-wilayah tersebut, maka hubungan antar kedua wilayah tersebut akan menjadi lebih kuat (Wahidin, 2021). Mobilisasi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing wilayah menghasilkan interaksi wilayah yang mencakup pergerakan orang, kendaraan, barang, serta berbagai elemen wilayah lainnya seperti teknologi, modal, dan informasi yang dapat diakses melalui sistem transportasi. Utoyo (2007) mengemukakan bahwa interaksi wilayah dapat dianalisis dengan menggunakan model gravitasi. Pada intinya, model gravitasi tersebut menggambarkan bahwa dua wilayah yang memiliki massa tertentu

akan saling menarik satu sama lain, menciptakan gaya tarik menarik antara keduanya.

Interaksi wilayah ini merupakan bagian dari strategi integrasi spasial sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan dari pusat pertumbuhan. Terdapat konsep *functional spatial integration* oleh Rondinelli (1983), yang merupakan pendekatan untuk menjembatani antara pendekatan pusat pertumbuhan dengan desentralisasi pengembangan wilayah dalam hal agropolitan. Karakteristik yang dimiliki masing-masing wilayah memunculkan interaksi antar wilayah dalam menunjang perkembangannya. Proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan antara permukiman satu dengan yang lain yang menyebabkan penduduk mampu mengakses fasilitas, infrastruktur, dan kegiatan pelayanan sehingga terbentuk pergerakan penduduk yang berdampak penting bagi suatu daerah. Interaksi wilayah dapat diukur menggunakan model gravitasi. Model gravitasi ini berguna untuk menganalisis dan memprediksi pola interaksi spasial. Pada dasarnya, prinsip perhitungan interaksi wilayah mengikuti hukum Newton, di mana jika dua objek berdekatan, keduanya akan mengalami gaya gravitasi. Kekuatan gaya ini tergantung pada massa kedua objek dan jarak antara keduanya.

#### **1.5.6. Tingkat Perkembangan Wilayah**

Tingkat perkembangan wilayah merupakan sebuah bentuk regionalisasi yang mengelompokkan wilayah berdasarkan kesamaan potensi serta karakteristik yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek sosial serta ekonomi (Muta'ali, 2015). Budiharjo (1995) menjelaskan bahwa tingkat

perkembangan wilayah merupakan fungsi dari lingkungan alam, penduduk, kegiatan ekonomi, serta kegiatan sosial yang mana fungsi tersebut akan membentuk suatu interaksi yang dapat mempengaruhi kondisi perkembangan wilayah. Lestari & Trihadiningrum (2016) menjelaskan bahwasannya perkembangan wilayah akan menimbulkan struktur wilayah yang bertingkat yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu tingkat perkembangan tinggi, sedang, dan rendah. Banyaknya ragam indikator yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah menjadikan pengukuran tingkat perkembangan wilayah pada dasarnya tidak memiliki indikator yang baku. Menurut BPS (2010), untuk mengetahui perkembangan wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Regional yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BPS (2010) dalam dokumen Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional mengatakan bahwa pengukuran kinerja pembangunan wilayah pada awalnya menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan. Namun, PDRB atas dasar harga konstan memiliki kelemahan yaitu tingginya nilai PDRB tidak menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kelemahan ini, UNDP (2019) mengajukan ukuran lain, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, diperluas dan diperdalam dengan konsep pembangunan manusia menjadi lima dimensi, yaitu pemberdayaan, kerjasama, kesamaan, keberlanjutan, dan keamanan. Penggunaan IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran bagi penentuan perimbangan keuangan daerah. Namun,

terdapat kritik yang ditujukan pada perkembangan nilai IPM karena dinilai sangat lambat oleh sejumlah pemerintah daerah. Munculnya kritik ini disebabkan adanya hal yang kurang disadari oleh pemerintah daerah bahwa nilai IPM tidak dapat meningkat secara drastis dalam jangka pendek karena perubahan nilai IPM akan dapat terlihat secara jelas dalam jangka waktu lima tahun atau lebih.

Adanya keterbatasan terhadap IPM, telah memunculkan ide mengenai pengukuran pembangunan regional yang lebih luas. BPS (2010) mengajukan ukuran yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Regional (IPR) yang mencoba mengukur kinerja pembangunan wilayah yang didasarkan pada enam kelompok modal yaitu modal alami, modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal sosial, dan modal teknologi informasi dan komunikasi. Kajian awal penyusunan IPR merupakan kajian yang komprehensif karena telah mengukur pembangunan regional berdasarkan sejumlah besar indikator. Akan tetapi, kelemahan pada kajian awal tersebut adalah tidak memisahkan antara indikator input dan *output/outcome* sehingga hasil pengukurannya menjadi kurang valid. Berdasarkan masukan dari para ahli dan literatur yang ada serta ketersediaan data, diputuskan sebanyak lima dimensi pembangunan yang akan diukur dalam penyusunan IPR ini. Kelima dimensi pembangunan yang akan diukur tersebut mencakup: Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik, Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, dan Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun dimensi tersebut diturunkan menjadi sub dimensi, yaitu:

## 1. Dimensi Ekonomi

Pembangunan yang efektif harus memiliki kapasitas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini terkait dengan kemampuan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan wilayah serta pendapatan per kapita penduduknya. Selain itu, pembangunan juga harus mampu mengubah gaya hidup penduduk menuju modernisasi, mendorong proses industrialisasi, dan mengurangi tingkat pengangguran. Dalam konteks penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR), dimensi ekonomi dapat dibagi menjadi tiga sub-dimensi utama, yaitu: pendapatan dan urbanisasi, ketenagakerjaan, serta kemampuan keuangan daerah, investasi, dan struktur ekonomi.

## 2. Dimensi Sosial

Hakikat pembangunan yang utama adalah kemampuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya dengan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dan kemampuan membaca sebagai fondasi pengetahuan. Selain itu, pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas kesehatan penduduk serta mengendalikan pertumbuhan penduduk agar struktur penduduknya stabil. Akhirnya, pembangunan juga harus mampu mengatasi kemiskinan. Dalam rangka penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR), dimensi sosial dijabarkan dalam empat kelompok sub-dimensi utama, yaitu: pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan aspek sosial lainnya.

### 3. Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pembangunan dapat diukur secara konkret melalui perkembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang tersedia. Infrastruktur yang mendukung mobilitas penduduk, seperti sistem transportasi, khususnya jalan sebagai infrastruktur utama untuk lalu lintas, serta sarana keuangan yang efisien untuk mengakomodasi transaksi masyarakat, merupakan komponen penting dalam pembangunan. Listrik juga memiliki peran penting untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Regional (IPR), dimensi infrastruktur dan pelayanan publik menjadi aspek yang signifikan. Dimensi ini terdiri dari tiga kelompok sub-dimensi utama, yaitu: pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

### 4. Dimensi Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa tidak ada penurunan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya alam, karena semuanya akan diwariskan kepada generasi mendatang. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam adalah pencemaran. Oleh karena itu, dimensi lingkungan diintegrasikan sebagai aspek penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Regional (IPR). Dimensi ini mencakup dua sub-dimensi utama, yaitu pencemaran air dan tanah serta pencemaran udara.

## 5. Dimensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Melalui komunikasi, setiap individu dapat berinteraksi satu sama lain. Namun, seiring perkembangan zaman, komunikasi tidak lagi terbatas pada interaksi langsung antar individu. Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan. TIK terdiri dari beberapa unsur, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan komunitas yang mengelolanya (brainware).

Pentingnya TIK dalam era ini sangat dominan terkait dengan intelektualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. TIK membuka pintu gerbang untuk mengakses berbagai pengetahuan dan informasi, memberikan kesempatan bagi wilayah untuk memanfaatkannya secara maksimal.

Penentuan indikator merupakan hal krusial dalam menganalisis perkembangan wilayah. Kesalahan dalam penentuan indikator dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Penentuan indikator harus didasarkan pada teori, logika, dan asumsi yang jelas agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran tingkat perkembangan wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur proses pembangunan yang telah dilaksanakan di suatu wilayah.

### **1.5.7. Hubungan Tingkat Aksesibilitas Wilayah dengan Tingkat Perkembangan Wilayah**

Pembangunan wilayah sering dikaitkan dengan proses untuk merangsang perkembangan sosial-ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan di suatu wilayah (Pane, 2013). Agar tujuan-tujuan ini dapat tercapai dalam pembangunan, negara dapat mengarahkan upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemampuan mereka dalam mengakses kegiatan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan ketersediaan dan distribusi barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat (Wirawan & Nurpratiwi, 2015). Perkembangan di suatu wilayah akan berlangsung dengan lebih cepat jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan sistem jaringan yang tersedia di wilayah tersebut.

Faktor aksesibilitas memainkan peran penting dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik (Ramadani, 2019). Oleh karena itu, pengembangan wilayah harus didukung oleh sistem transportasi yang efisien, karena sarana dan prasarana transportasi yang baik akan berkontribusi pada pembangunan wilayah yang lebih baik. Sumaatmaja (1988) menekankan bahwa sarana dan prasarana yang ada di suatu wilayah menjadi dasar yang penting untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Infrastruktur transportasi, seperti sarana dan prasarana, memiliki dampak positif terhadap pembangunan fisik suatu wilayah (Sumadi, 2017). Selain itu, jumlah sistem jaringan jalan di suatu wilayah juga berpengaruh pada

tingkat aksesibilitas dalam wilayah tersebut. Dengan kata lain, aksesibilitas yang baik akan memfasilitasi interaksi antara masyarakat di berbagai wilayah dan dapat menghasilkan pemerataan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu wilayah juga erat kaitannya dengan tingkat aksesibilitas wilayah, di mana peningkatan aksesibilitas biasanya berdampak pada percepatan perkembangan wilayah (Mutaali, 2015).

### **1.6. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan sebuah hal yang diperlukan sebagai bukti untuk menghindari plagiarisme dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Rencana penelitian yang akan dilakukan terkait dengan tingkat aksesibilitas wilayah dan perkembangan wilayah. Beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi yang digunakan yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, tahun penelitian, tujuan penelitian, variabel penelitian, metode penelitian.

Firdausi (2015) telah melakukan sebuah penelitian mengenai Tingkat dan Arah Perkembangan Wilayah Kabupaten Kuningan dengan menggunakan kecamatan sebagai unit analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah, menjelaskan arah perkembangan fisik wilayah perkotaan secara spasial, serta menjelaskan keterkaitan antara arah dan tingkat perkembangan wilayah dengan rencana tata ruang di Kabupaten Kuningan selama periode tahun 2007-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, yang melibatkan penggunaan data sekunder (studi literatur) dan data primer (interpretasi citra satelit). Proses

pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini mencakup teknik *scalling* dan pembobotan, indeks sentralitas skala Guttman, analisis spasial, dan triangulasi. Variabel dalam penelitian tersebut meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan fasilitas infrastruktur/pelayanan. Hal yang berbeda dengan penelitian ini adalah pada unit analisis, lokasi penelitian, tujuan, metode, dan variabel penelitian. Penelitian tersebut menekankan pada keterkaitan arah dan tingkat perkembangan wilayah dengan rencana tata ruang, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada tingkat perkembangan wilayah dan aksesibilitas wilayah, tipe hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dan aksesibilitas wilayah, serta rekomendasi strategi pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel yang digunakan juga berbeda dalam menilai tingkat perkembangan wilayah karena pada penelitian tersebut menggunakan tiga dimensi, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel lima dimensi.

Sumadi, dkk (2017) telah mengadakan sebuah penelitian mengenai Hubungan Aksesibilitas terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Tomohon. Tujuan penelitiannya untuk mengeksplorasi hubungan antara aksesibilitas yang dipengaruhi oleh sistem jaringan jalan dan perkembangan wilayah per kecamatan di Kota Tomohon dengan menggunakan kecamatan sebagai unit analisis. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan teknik analisis indeks alpha, location quotient (LQ), dan analisis korelasi. Variabel yang digunakan mencakup indeks aksesibilitas yang terdiri dari Ruas Jalan dan Titik Simpul, serta indeks Perkembangan Wilayah yang mencakup jumlah TK, SD, SMP, SMA, dan PT. Perbedaan signifikan antara penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya terletak pada unit analisis yang digunakan, lokasi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan variabel yang dievaluasi. Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih lengkap karena tidak hanya berfokus pada hubungan aksesibilitas dan tingkat perkembangan wilayah, tetapi juga memberikan rekomendasi strategi pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tipologi yang telah diolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teknik skoring, indeks komposit, tabulasi silang, dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi perkembangan wilayah. Penelitian ini juga mengenalkan indikator perkembangan wilayah dengan lima dimensi yang berbeda serta variabel aksesibilitas yang dianalisis dengan mempertimbangkan aksesibilitas internal dan eksternal.

Prakoso (2018) telah melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten selama periode tahun 2005-2015. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis variasi tingkat perkembangan wilayah di kecamatan-kecamatan Kabupaten Klaten selama periode tersebut, dengan tujuan untuk menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Klaten. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecamatan. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik skoring dan indeks komposit. Variabel yang digunakan untuk mengukur Tingkat Perkembangan Wilayah meliputi aspek kependudukan dan sosial ekonomi. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada unit analisis penelitian, lokasi penelitian, periode tahun penelitian, tujuan penelitian, dan variabel yang digunakan.

Nurhidayani, A.F., dkk (2018) telah melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Hubungan Aksesibilitas terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara aksesibilitas yang dipengaruhi oleh sistem jaringan jalan dan perkembangan wilayah di desa-desa yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan teknik analisis Indeks Alpha, analisis Scalogram, dan analisis korelasi. Variabel yang digunakan untuk mengukur Tingkat Perkembangan Wilayah mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan peribadatan, sementara indeks aksesibilitas melibatkan Ruas Jalan dan Titik Simpul. Terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait unit analisis penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan variabel penelitian.

Zakiah (2019) telah melakukan penelitian mengenai Analisis Spasial Tingkat Perkembangan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Lamongan, memahami hirarki wilayah dan pusat pelayanan di Kabupaten Lamongan, serta mengidentifikasi tipologi wilayah perkotaan di Kabupaten Lamongan. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecamatan. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan penggunaan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan mencakup teknik penskoran, teknik scalogram, indeks sentralitas, dan analisis

konig dan shimbel. Variabel yang digunakan dalam penelitian mencakup indikator Tingkat Perkembangan Wilayah dan indikator fasilitas sosial dan ekonomi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada unit analisis penelitian, lokasi penelitian, dan adanya tambahan tujuan penelitian untuk menganalisis rekomendasi strategi pembangunan wilayah berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan tingkat aksesibilitas di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian**

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Tingkat dan Arah Perkembangan Wilayah Kabupaten Kuningan	Salsabila Firdausi (2015)	1.Mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Kuningan. 2.Mendeskripsikan arah perkembangan fisik kekotaan wilayah di Kabupaten Kuningan secara spasial tahun 2007-2017 3.Mendeskripsikan keterkaitan antara arah dan tingkat	Metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder (studi literatur) serta data primer (interpretasi citra satelit). Pengolahan dan analisis data yang digunakan dengan teknik scalling dan pembobotan, indeks sentralitas skala Guttman, analisis spasial, dan triangulasi.	Sosial: Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Rata-rata lama sekolah IPM Ekonomi: Presentase Keluarga Pra Sejahtera Presentase Tenaga Kerja Bekerja di Sektor Non Pertanian	1.Terdapat tiga tingkatan perkembangan wilayah dengan tipe I, II, dan III. Sebagian besar tingkat perkembangan wilayah termasuk ke dalam tipe I dan III dengan TPW tertinggi berada di Kecamatan Kuningan sebagai pusat perkembangan wilayah tertinggi pada tahun 2007-2017 yang dapat mendukung perkembangan wilayah di kecamatan lain khususnya pada kecamatan di sekitarnya, yaitu Kecamatan Kramatmulya, Cigugur, Kadugede, dan Sindangagung. 2.Adapun perkembangan fisik

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
			perkembangan wilayah dengan rencana tata ruang Kabupaten Kuningan.		Infrastruktur/ Fasilitas Pelayanan: Jumlah Fasilitas Ekonomi (Pasar, Minimarket, Kelompok Pertokoan, Toko Kelontong, Warung Makan, Kedai, KUD, Bank, Hotel Jumlah Fasilitas Pendidikan (TK, SD,	kekotaan di Kabupaten Kuningan secara spasial menunjukkan kecenderungan perembetan dari pusat ibukota ke arah utara dan timur. 3.Perkembangan wilayah di Kabupaten kuningan berdasarkan hasil identifikasi tingkat perkembangan non fisik dan arah perkembangan fisik perkotaan wilayah menunjukkan hubungan yang kuat dan memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					SMP, SMA, Perguruan Tinggi) Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Praktek Dokter, Apotek)	

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
2.	Hubungan Aksesibilitas terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Tomohon	Stevanus Hariona Tricahyo Sumadi, Ir. Papi J.C.F, M.Si., Ir. Indrajaja M, M.Ars. (2017)	1.Mengetahui hubungan aksesibilitas yang didalamnya dipengaruhi oleh sistem jaringan jalan dan perkembangan wilayah per kecamatan di Kota Tomohon	Analisis Indeks Alpha, Analisis Location Quotient (LQ), analisis korelasi	Nilai Aksesibilitas (Ruas Jalan, Titik Simpul) Nilai Perkembangan Wilayah (TK, SD, SMP, SMA, PT)	1.Kecamatan yang memiliki tingkat aksesibilitas yang paling tinggi adalah kecamatan Tomohon Timur dan yang paling rendah adalah kecamatan Tomohon Barat. Sedangkan untuk tingkat perkembangan wilayah, Kecamatan Tomohon Tengah merupakan kecamatan dengani nilai perkembangan paling tinggi dan Kecamatan Tomohon Barat memiliki nilai perkembangan paling rendah. Hasil perhitungan korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara aksesibilitas wilayah dan

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
						<p>perkembangan wilayah kecamatan di Kota Tomohon. Terdapat beberapa saran yang dihasilkan yaitu pertama, pemerataan jaringan jalan di kecamatan yang memiliki nilai aksesibilitas rendah. Kedua adalah pemerataan pembangunan yang memiliki peran vital dalam perkembangan wilayah seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan fasilitas perindustrian di kecamatan yang memiliki nilai perkembangan rendah.</p>

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
3.	Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2015	Fadli Bagash Prakoso (2018)	1.Mengetahui variasi tingkat perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2005-2015. 2.Mengetahui prioritas perkembangan pembangunan di Kabupaten Klaten.	Metode diskriptif dengan Teknik Skoring, Indeks Komposit	Kependudukan (Kepadatan Penduduk) Aksesibilitas Wilayah (Kepadatan Jalan) Sosial Ekonomi (Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Pasar)	1.Tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Klaten lebih cenderung berkembang di wilayah pusat kota dan wilayah sekitar pusat kota serta wilayah dengan sarana prasarana yang memenuhi. 2.Wilayah yang menjadi prioritas I atau prioritas utama untuk dilakukan pengembangan wilayah adalah Kecamatan Gantiwarno, Kebonarum, Karangnongko, Karangdowo, Polanharjo, dan Kemalang.

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
4.	Hubungan Aksesibilitas terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi	Alif Fikri Nurhidayani, Prima J.O, Irfan Ihsani (2018)	1.Mengetahui hubungan aksesibilitas yang didalamnya dipengaruhi sistem jaringan jalan dan perkembangan wilayah perdesaan di kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi	Indeks Alpha, analisis scalogram, analisis korelasi	Nilai Aksesibilitas (Ruas Jalan, Titik Simpul) Nilai Perkembangan Wilayah (fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan peribadatan)	1.Desa yang memiliki tingkat aksesibilitas paling tinggi adalah desa Tambun dengan nilai - 0,023 dan desa yang paling rendah adalah desa Lambangsari dengan nilai 0,270. Sedangkan untuk tingkat perkembangan wilayah, desa Tambun merupakan desa yang memiliki tingkat perkembangan wilayah yang paling tinggi dengan nilai range 266,94 dan mendapatkan kategori hierarki 1 dan desa Lambangjaya merupakan desa yang paling rendah tingkat perkembangan wilayah dengan

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
						<p>nilai range 115 dan mendapatkan kategori hierarki 3. Berdasarkan output (hasil) perhitungan antara aksesibilitas wilayah dan perkembangan wilayah dapat diketahui bahwa nilai korelasi antara dua variabel ini adalah sebesar 0,738. Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel ini termasuk dalam kategori hubungan erat karena nilai r diantara nilai 0,7 – 0,9. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dihasilkan yaitu pertama, pemerataan jaringan</p>

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
						jalan di desa yang memiliki nilai aksesibilitas rendah. Kedua adalah pemerataan pembangunan yang memiliki peran vital dalam perkembangan wilayah seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perindustrian, fasilitas peribadatan di kecamatan yang memiliki nilai perkembangan rendah.
5.	Analisis Spasial Tingkat Perkembangan Wilayah Perkotaan di	Ilmiyatuz Zakiyah (2019)	1. Mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Lamongan	Metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan	Tingkat Perkembangan Wilayah (Tenaga Kesehatan, Angka Kematian Bayi, Bayi dengan Gizi Buruk,	1. Tingkat perkembangan wilayah terbagi menjadi 3 kelas yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah. Tingkat Perkembangan kelas tinggi terdiri dari 2 kecamatan, kelas sedang terdiri dari 16

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
	Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.		<p>2. Mengetahui hirarki wilayah dan pusat pelayanan di Kabupaten Lamongan</p> <p>3. Mengetahui tipologi untuk menentukan wilayah perkotaan di Kabupaten Lamongan</p>	<p>adalah Teknik Penskoran, Teknik Skalogram dan Indeks Sentralisasi, serta analisis Konig dan Shimbel</p>	<p>Penggunaan Akses Air Minum Berkualitas, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk. Fasilitas Sosial dan Ekonomi (Kursus, Rumah sakit, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Praktek dokter, Apotek, Kantor Pos, Terminal, SPBU, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi,</p>	<p>2. kecamatan, dan kelas rendah terdiri dari 9 kecamatan.</p> <p>3. Hirarki pusat pelayanan di Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 3 Hirarki, yaitu Hirarki I (tinggi), Hirarki II (sedang) dan Hirarki III (rendah). Kecamatan yang memiliki jumlah skor terendah dan termasuk dalam klasifikasi Hirarki III terdiri dari 23 kecamatan, kecamatan yang memiliki skor sedang dan termasuk dalam klasifikasi Hirarki II terdiri dari 1</p>

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					Pasar, Pegadaian, Bengkel, Hotel, Tempat Rekreasi, Bank, dan Perindustrian.	kecamatan, dan kecamatan yang memiliki skor tinggi dan termasuk dalam klasifikasi hirarki I yaitu 3 kecamatan. 4. Tipologi wilayah sebagai penentu wilayah perkotaan di Kabupaten Lamongan Kecamatan Lamongan terbagi menjadi 3 tipe. Tipe I artinya wilayah tersebut sebagai wilayah yang maju dan tergolong kedalam wilayah perkotaan, tipe II dikategorikan sebagai wilayah yang akan berkembang, dan tipe III dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
6.	Analisis Hubungan Tingkat Perkembangan Wilayah dan Aksesibilitas Wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan 2020	Shafira Nur Sechan (2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>Mengidentifikasi tingkat aksesibilitas wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>Mengidentifikasi tipe hubungan antara</li> </ol>	<p>Metode kuantitatif dengan data sekunder.</p> <p>Teknik analisis yang digunakan adalah teknik penskoran, indeks komposit, model gravitasi, analisis tabulasi silang, dan analisis SWOT.</p>	<p>Tingkat Perkembangan Wilayah:</p> <p>Dimensi Ekonomi</p> <p>Dimensi Sosial</p> <p>Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik</p> <p>Dimensi Lingkungan</p> <p>Dimensi TIK</p> <p>Tingkat Aksesibilitas Wilayah:</p> <p>Akses: Sarana Transportasi Darat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terjadi perubahan tingkat aksesibilitas wilayah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2020 dengan klasifikasi naik, tetap, dan turun. Klasifikasi naik hanya dimiliki oleh Kabupaten Paser dan Kutai Timur, klasifikasi turun hanya dimiliki oleh Kota Samarinda. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya memiliki klasifikasi tetap.</li> <li>Terjadi perubahan tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2020 dengan klasifikasi naik,</li> </ol>

(Lanjutan Tabel 1.1.)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
			<p>tingkat perkembangan wilayah dan tingkat aksesibilitas wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>5. Menentukan rekomendasi strategi pembangunan wilayah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.</p>		<p>Sarana Transportasi Udara</p> <p>Sarana Transportasi Air</p> <p>Prasarana Transportasi Darat</p> <p>Prasarana Transportasi Udara</p> <p>Prasarana Transportasi Air</p> <p><i>Linkage:</i></p> <p>Interaksi Wilayah</p>	<p>tetap, dan turun. Adapun kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi tetap adalah Kabupaten Paser, klasifikasi turun berada di Kabupaten Kutai Timur, sementara itu kabupaten/kota lainnya berada pada klasifikasi naik.</p> <p>3. Variasi tingkat aksesibilitas wilayah dan tingkat perkembangan wilayah dilakukan analisis tabulasi silang sehingga menghasilkan empat bentuk tipologi, yaitu aksesibilitas naik dan TPW tetap, aksesibilitas tetap dan</p>

(Lanjutan Tabel 1.1)

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
						<p>TPW naik, aksesibilitas naik dan TPW turun, serta aksesibilitas turun dan TPW naik.</p> <p>Penyusunan tipologi digunakan untuk menentukan rekomendasi strategi kebijakan pengembangan wilayah.</p> <p>Penyusunan rekomendasi strategi disusun berdasarkan analisis SWOT berdasarkan masing-masing tipe wilayah tersebut berdasarkan kondisi wilayahnya.</p>

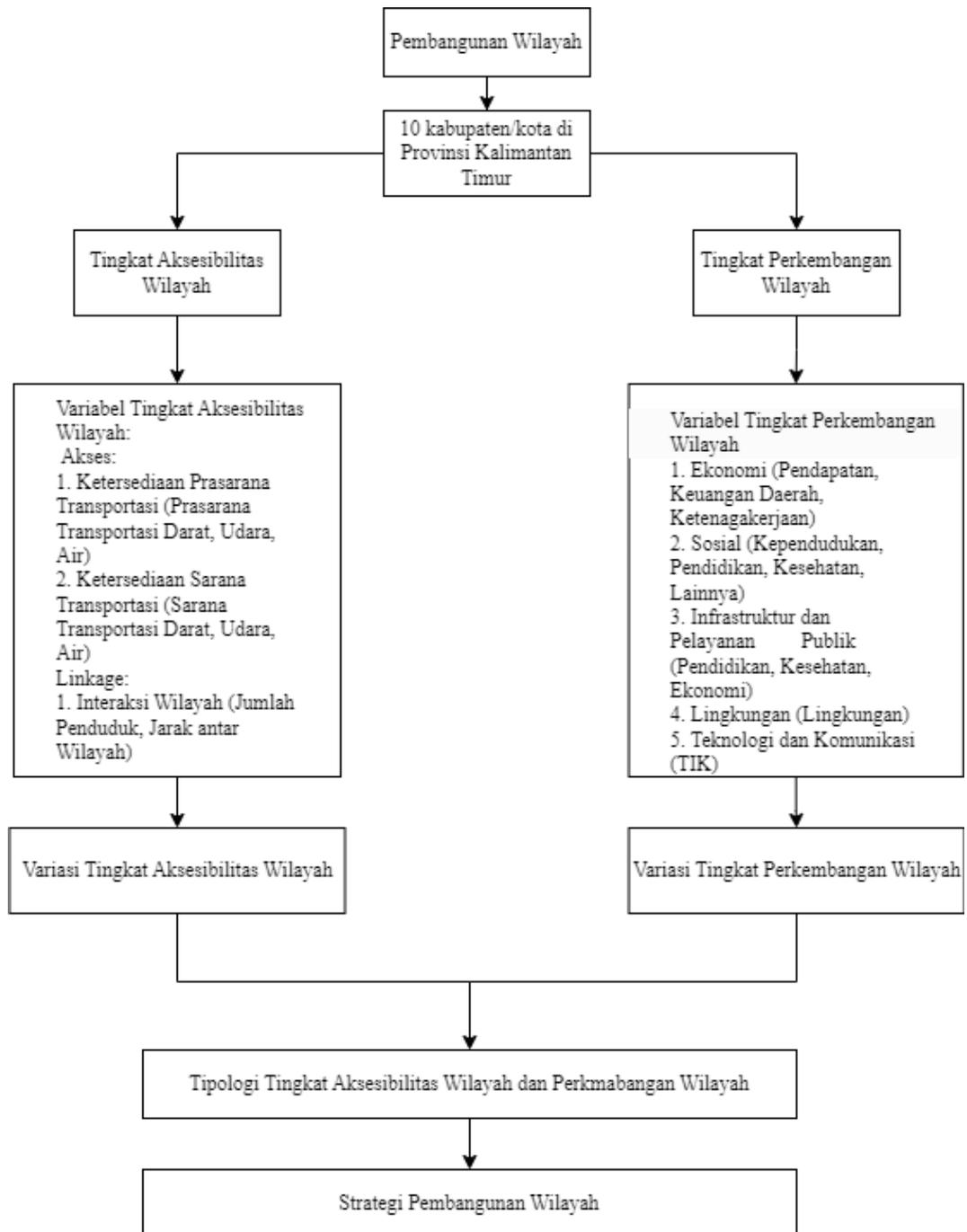
## **1.7. Kerangka Pemikiran**

Wilayah merupakan unit geografis yang memiliki batas spesifik tertentu, dengan komponen di dalam wilayah tersebut saling berinteraksi secara fungsional. Terdapat perbedaan kondisi wilayah sehingga menyebabkan kesenjangan di mana kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata antara wilayah satu dengan wilayah lain terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, tingkat aksesibilitas wilayah juga sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu wilayah. Apabila aksesibilitas di suatu wilayah rendah, maka wilayah tersebut tidak akan terkoneksi dengan wilayah lain sehingga aktivitas masyarakat menjadi terhambat dan menyebabkan tingkatan pembangunan wilayah menjadi rendah.

Perbedaan kondisi wilayah satu dengan wilayah yang lain membuat adanya kondisi pembangunan wilayah yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui kondisi pembangunan wilayah pada sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, maka dilakukan pengidentifikasian terhadap Tingkat Aksesibilitas Wilayah dan Tingkat Perkembangan Wilayah. Identifikasi tingkat aksesibilitas wilayah dilakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan ketersediaan infrastruktur berupa prasarana transportasi, sarana transportasi, serta interaksi wilayah. Adapun untuk mengetahui interaksi wilayah dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Data terkait tingkat aksesibilitas kemudian diolah dengan teknik skoring, rumus gravitasi, dan indeks komposit. Setelah kedua jenis data tersebut dikumpulkan dan dianalisis, maka terdapat variasi antar kabupaten/kota. Sementara itu, tingkat perkembangan wilayah dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan

dengan dimensi ekonomi, sosial, infrastruktur dan pelayanan publik, lingkungan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dengan data tersebut maka dilakukan pengolahan data dengan teknik skoring dan indeks komposit yang akan menghasilkan tipologi sehingga dapat diketahui hirarki tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut kemudian diolah menjadi peta sebagai visualisasi untuk memudahkan dalam melihat variasi kondisi tingkat aksesibilitas wilayah dan tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil dari perhitungan indeks komposit antara tingkat aksesibilitas wilayah dan tingkat perkembangan wilayah diberikan klasifikasi tingkat perkembangan wilayah dan tingkat aksesibilitas wilayah melalui *crosstab* dengan tingkat aksesibilitas wilayah dan tingkat perkembangan wilayah dpada tahun 2016 dan 2020 dengan klasifikasi naik, tetap, dan turun. Hasil tipologi berdasarkan analisis tabulasi silang masing-masing dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran**